

**PENGARUH PENDAPATAN DAN MASA KERJA
TERHADAP KINERJA APARATUR NAGARI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Administrasi Publik FIS UNP sebagai
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

AGNESIA ANANTA

TM/NIM : 2015/15042100

PROGRAM STUDI

ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pendapatan Dan Masa Kerja Terhadap
Kinerja Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan
Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar

Nama : Agnesia Ananta

NIM/TM : 15042100/2015

Program Studi : Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 Agustus 2019

**Disetujui oleh:
Pembimbing**



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
19630401198903 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

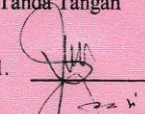
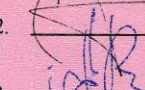
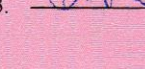
Pada hari Selasa, Tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

**Pengaruh Pendapatan Dan Masa Kerja Terhadap Kinerja
Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di
Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Agnesia Ananta
NIM/TM : 15042100/2015
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 6 Agustus 2019

Tim Peguji

Nama		Tanda Tangan
1. Ketua	Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D	1. 
2. Anggota	Dra. Jumiati, M.Si	2. 
3. Anggota	Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	3. 

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Dr.Siti Fatimah,M.P.d.,M.Hum

NIP.19610218 198403 2 001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agnesia Ananta

NIM/TM : 15042100/2015

Tempat/Tanggal Lahir : Sawahlunto/ 04 November 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul : *"Pengaruh Pendapatan Dan Masa Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar"* adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 06 Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan



Agnesia Ananta

NIM. 15042100/2015

ABSTRAK

AGNESIA ANANTA (2015/15042100) : Pengaruh pendapatan dan masa kerja terhadap kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan masa kerja terhadap kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang penelitian ini dilakukan adalah karena adanya indikasi masih kurang baiknya pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan bentuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 600 responden. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 248 aparatur nagari yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Multi Stage Random Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket yang disebarakan kepada responden dengan pengukuran kepastian data numerik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Uji Anova.

Dari analisis data yang telah dilakukan maka hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari, dengan angka signifikansi 0,939. Kemudian untuk variabel masa kerja juga tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari, dengan angka signifikansi 0,515. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan dan masa kerja apartur tidak berpengaruh secara signifikan dalam pengelolaan keuangan nagari.

Kata Kunci: *Pendapatan, Masa kerja, Kinerja, Pengelolaan Keuangan Nagari*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan dan Masa Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.P.D., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang,
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing.
4. Ibuk Dra. Jumiaty M.Si selaku dosen penguji I dan Ibuk Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku dosen penguji II.
5. Bapak dan Ibuk Dosen pengajar beserta staf administrasi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hamdani dan Ibunda Esmiwarnida beserta Uda Reynol Leswara dan kakak Maya Anggraini yang selalu memberikan do'a, motivasi, pengorbanan dan ketulusannya mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada Egi Rivaldi yang sudah memberikan semangat dan Motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada Khairani dan Rahmi yanti yang selalu memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih Kepada Sahabatku Felicya Astwilanda Putri, S.AP yang sama-sama berjuang, panas dan hujan di tempuh untuk sebuah gelar S.AP dan pada akhirnya kompre bareng.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, juni 2019

Penulis

AGNESIA ANANTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Kajian Teori	14
1. Konsep Kinerja.....	14
2. Pengelola Keuangan Nagari dan Indikator pengukurnya.....	16
3. Pendapatan	24
4. Masa Kerja	26
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Hipotesis Penelitian	31
D. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Operasionalitas Variabel	34
D. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	39
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	42
G. Validitas dan Reliabilitas.....	43
H. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Temuan Umum	48
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar.....	48
2. Visi Misi Kabupaten Tanah Datar	49

3. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar.....	50
B. Profil Responden.....	52
C. Temuan Khusus.....	58
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Aparatur Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar	40
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel.....	41
Tabel 3.3 Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan.....	44
Tabel 3.4 Uji Reliabilitas Pengelolaan Keuangan.....	45
Tabel 4.1 Profil Responden Menurut Klarifikasi Umur	53
Tabel 4.2 Profil Responden Menurut Jenis Kelamin	53
Tabel 4.3 Profil Responden Menurut Jumlah Gaji.....	54
Tabel 4.4 Profil Responden Menurut Status Perkawinan	54
Tabel 4.5 Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir	55
Tabel 4.6 Profil Responden Menurut Jabatan	56
Tabel 4.7 Profil Responden Menurut Pendapatan Bersih	56
Tabel 4.8 Profil Responden Menurut Masa Kerja	57
Tabel 4.9 Deskripsi Pendapatan.....	58
Tabel 4.10 Deskripsi Masa Kerja.....	59
Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Transparansi	60
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Akuntabilitas	61
Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Partisipasi.....	62
Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Disiplin dan Tertib Anggaran	63
Tabel 4.15 Deskripsi Variabel Pengelolaan Keuangan.....	64
Tabel 4.16 Pengaruh Pendapatan Aparatur Terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari	65
Tabel 4.17 Anova	66
Tabel 4.18 Benferroni	67
Tabel 4.19 Pengaruh Masa Kerja Aparatur Terhadap Pengelolaan Keuangan...	68
Tabel 4.20 Anova	69
Tabel 4.21 Bonferroni	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran Angket Penelitian

Lampiran Surat Keterangan/Rekomendasi Penelitian

Lampiran Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No.17, 2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat di dalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006).

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah, termasuk keuangan nagari. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat serta dapat dibandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Pemerintah nagari adalah institusi yang setara dalam strata pemerintahan. nagari dikepalai oleh masyarakat sipil biasa yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakatnya. nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah Kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. nagari sendiri di dalam struktur pemerintahan dipimpin oleh seorang Wali nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Wali nagari dibantu oleh sekretaris, kepala urusan serta kepala kampung yang dipilih dengan menggunakan hak priogatif Wali nagari untuk membantu berjalannya suatu system organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien (Harry: 2018).

Nagari (desa) merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi desa untuk

menyelenggarakan pengelolaan keuangan sendiri. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara yaitu dalam UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam kedua UU tersebut dijelaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini dipertegas dengan adanya keharusan untuk menyusun APBD desa yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan tersebut, maka secara hukum pemerintah desa atau nagari wajib untuk melaporkan kinerjanya kepada pemerintah dan masyarakat.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa atau nagari diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Berdasarkan UU ini, desa diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur secara mandiri urusan rumah tangganya, dimulai dari adanya kejelasan dan kepastian hukum atas desa, melestarikan adat budaya dan tradisi desa, mendorong partisipasi untuk mengembangkan potensi dan aset desa, menjadikan pemerintahan desa yang efektif, efisien, profesional, terbuka dan bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat desa sebagai tujuan dari pembangunan.

Keistimewaan UU Nomor 6 Tahun 2014 dibandingkan Undang-Undang terdahulu yang mengatur tentang desa, yang mana salah satunya adalah tiap desa atau nagari akan mendapatkan kucuran dana dari APBN (alokasi dana desa) yang

berkisar 1,4 Milyar/tahun/desa. Namun besaran dana yang diterima tiap desa berbeda beda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Bila kepala desa/ walinagari maupun aparaturnya tidak menguasai akuntansi atau pengelolaan keuangan, sangat rawan terjadinya korupsi tingkat desa. Kepala desa atau wali nagari maupun aparaturnya sampai sekarang dalam pembukuan masih sangat sederhana. Mereka hanya mencatat transaksi yang terjadi setiap harinya secara manual dimana setiap kas yang masuk mereka catat sebagai pendapatan dan setiap kas yang keluar dicatat sebagai pengeluaran. Sehingga internal kontrol terhadap pengelolaan keuangan nagari ini sangat lemah sekali (Sukartini: 2016).

Dalam pemerintahan nagari, kinerja aparatur nagari didukung oleh dana Anggaran Pemerintahan Nagari (APBN) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat digunakan berdasarkan sistem penggunaan yang telah ditentukan. Oleh karena itu kinerja aparatur nagari di kenagarian harus dievaluasi dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Proses penilaian kinerja aparatur nagari tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab para pemimpin, motivasi kerja yang ada, serta pelatihan aparatur nagari di instansi tersebut. Peningkatan kinerja aparatur nagari senantiasa dilakukan agar dapat mencapai sasaran pelayanan prima bagi masyarakat, yaitu terciptanya pelayanan yang disajikan oleh aparatur pemerintah yang sesuai dengan standar, serta dapat menciptakan citra positif bagi pemerintahan itu sendiri (Mardika Nanda : 2018).

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam

perusahaan untuk mencapai tujuan. Mangkunegara (2013) menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun sayangnya, evaluasi secara resmi dan terbuka terhadap kinerja aparatur nagari belum pernah dilakukan.

Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar No. 11 Tahun 2014 dikatakan bahwa pengelolaan keuangan nagari diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikatakan bahwa setiap belanja daerah yang diatasnamakan nagari harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Pengelolaan keuangan nagari akan dikelola dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yang terhitung dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 30 desember. Dalam Peraturan Bupati tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar dikelola dengan disiplin, transparan dan setiap pengeluaran yang terjadi harus memiliki bukti yang jelas. Namun pada kenyataannya masih dapat ditemukan pelanggaran atau penyimpangan mengenai pengelolaan keuangan nagari di kabupaten Tanah Datar dalam pengimplementasinya.

Dari berbagai fakta yang ditemukan mengenai pengelolaan keuangan nagari tersebut maka di lapangan masih banyak ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari, dari berbagai permasalahan yang terjadi tersebut banyak hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya permasalahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah mengenai pendapatan, karena pendapatan akan sangat mempengaruhi terhadap bagaimana kinerja pegawai terutama aparatur pengelolaan keuangan nagari dalam mengelola keuangan nagari.

Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai adalah dengan memberi gaji dan tunjangan kesejahteraan kepada pegawai. Dengan adanya gaji, maka hubungan pegawai dengan instansi akan dapat terjalin dengan baik, sehingga pegawai sendiri akan berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja karena merasa dihargai oleh instansi tersebut. Pemberian gaji akan berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai, ini disebabkan karena uang masih merupakan motivator yang kuat bagi pegawai, maka setiap instansi perlu memperhatikan mengenai gaji dan tunjangan kesejahteraan yang banyak diharapkan dari pada pegawai (Indriyani: 2014).

Gaji merupakan salah satu bentuk jenis imbalan yang diterima oleh pegawai, gaji juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk di perhatikan, sebab bagaimanapun juga seorang pegawai dalam bekerja pasti akan mengharapkan suatu imbalan atas pengorbanannya. Untuk itu dalam pemberian gaji yang penting adalah bahwa gaji yang diterima oleh pegawai dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk bekerja keras. Dengan demikian bahwa untuk menciptakan kinerja yang optimal dalam suatu instansi termasuk di dalamnya dibutuhkan suatu imbalan yang pantas dalam bentuk gaji bagi setiap pegawai di kantor tersebut (Winarni: 2013).

Selain itu, masa kerja merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan produktifitas kerja, usia dan masa kerja yang dirasakan oleh karyawan dapat menurunkan produktifitas ataupun meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas seseorang dalam bekerja adalah lama bekerja, Semakin lama masa kerja seseorang tenaga kerja seharusnya

keterampilan dan kemampuan melakukan pekerjaan semakin meningkat. Pengalaman seseorang melaksanakan pekerjaan secara terus-menerus mampu meningkatkan kedewasaan teknisnya. Masa kerja adalah tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan. Ada beberapa yang menentukan berpengalaman tidaknya seseorang karyawan dan sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu lama waktu/ usia kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan dan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan (Aprilyanti, 2017)

Seiring dengan bertambahnya masa kerja seorang karyawan, maka pengalaman kerja yang diperolehnya akan semakin banyak. Hal ini dapat membantu karyawan dalam meningkatkan kinerjanya (Muthia amanta,2017). Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap produktifitas karyawan adalah faktor usia, usia yang masih dalam masa produktif biasanya mempunyai tingkat produktifitas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas (Aprilyanti, 2017).

Kemudian juga di jelaskan oleh bapak Zulkifli S.Ag selaku Sekretaris di nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum bahwa, masih banyak aparatur nagari yang tergolong sudah tidak lagi muda dan masa kerjanya sudah lama. Di kesempatan yang sama Sekretaris nagari Sumpur juga mengatakan mengenai pendapatan dari aparatur nagari yang tergolong jauh dari kata layak, dan tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggungnya, dimana sekretaris nagari sumpur mengatakan:

“...Untuk masalah pendapatan kita sebagai aparatur nagari disini memang perlu ditingkatkan. Apalagi saya yang sebagai Sekretaris hanya mendapatkan gaji pokok lebih kurang Rp.1.500.000., dan itu sangat jauh dari cukup untuk kehidupan kita setiap bulannya, walaupun ada ditambah dengan tunjangan lainnya. Jadi saya rasa untuk kedepannya sangat perlu ditingkatkan lagi pendapatan aparatur nagari, karena dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab kita itu sangat berbanding jauh. Apalagi dalam hal pengurusan dana desa yang lebih kurang 1 Miliar per tahun, dan itu memiliki resiko dan tanggung jawab yang sangat besar”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris nagari Cubadak,

Kecamatan Lima kaum yaitu :

“...Tanggung jawab kita sebagai aparatur nagari di sini, sangat tidak sesuai dengan pendapatan yang kita terima setiap bulannya. Gaji yang rata rata kita terima setiap bulannya hanya Rp.1.500.000., Walaupun ditambah dengan tunjangan Rp.300.000, hal itu sangat tidak mencukupi kebutuhan kita sehari hari, sangat jauh dari kata cukup. Sedangkan uang nagari yang akan kita pertanggung jawabkan setiap tahunnya milyaran rupiah. Kalau kita tidak kuat iman dan tidak sebenar benarnya menjalankan tanggung jawab, bisa saja kita menyalah gunakan uang yang milyaran itu..”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris nagari

Cubadak, Kecamatan Limo Kaum, Bapak Zulkifli S.Ag yang sudah menjabat

selama dua periode mengatakan bahwa:

“..Masa kerja merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi kinerja aparatur nagari terutama yang berada di daerahnya. Pemilihan aparatur nagari pada saat terpilihnya wali nagari baru, tidak semuanya diganti. Ada diantara aparatur Nagari tersebut yang diganti, namun masih ada yang dipertahankan karena berbagai faktor. Akan tetapi pada selama dua periode masa jabatannya, dapat dilihat bahwa masa kerja sangat menentukan bagaimana kinerjanya. Aparatur nagari yang memiliki masa kerja lebih lama memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan aparatur yang baru masih kurang pengalaman terutama dalam hal pengelolaan keuangan di nagari. Akan tetapi tidak semata mata tentang berapa lama masa kerja yang dimiliki, faktor usia juga sangat mempengaruhi. Aparatur dengan masa kerja yang sudah lama, dengan pengalaman yang banyak terkadang juga belum tentu memiliki kinerja yang bagus, jika mereka sudah tidak lagi muda dan sangat sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Misalnya saja dalam hal pengelolaan keuangan nagari yang pelaporan pelaporannya sudah elektronik..”

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris nagari Labuah Kecamatan

Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, Ia mengatakan bahwa:

“Terkait dengan pendapatan bahwa untuk pendapatan ya sekedar cukup lah, dapek pagi Habih patang, istilahnyo umua panjang razaki diagakan lo. kalau pendapatan ketek, tu pemikiran ndak kasitu se, tu alah kurang lo kinerja nyo. Apo lai ndk ado kenaikan gaji dalam bara tahun ko. semangat kerja menurun. “lai samangek, tapi alah kurang, nan namo nyo karajo ko tu harus juo dikarajoan.”kalau masa kerja yang lama tidak menurun tetapi titik jenuh yang banyak, kalau dari segi tenaga udah berkurang, pikiran sudah berkurang, pemikiran tu tidak bisa dipaksakan, sudah banyak yang lupa.

(Terkait dengan pendapatan bahwa untuk pendapatan ya sekedar cukup, dapat pagi habis sore, istilahnya umur panjang rezeki dibatasi, kalau pendapatan kecil, terus pemikiran tidak hanya kesana saja, sudah berkurang juga kinerja nya. Apa lagi tidak adanya kenaikan gaji dalam beberapa tahun ni. Semangat kerja menurun, “iya semangat, tapi sudah kurang, yang nama nya kerja ya harus di kerjakan. Kalau masa kerja yang lama tidak menurun tetapi titik jenuh yang banyak, kalau dari segi tenaga udah berkurang, pikiran sudah berkurang, pemikiran itu tidak bisa dipaksakan, sudah banyak yang lupa.)

Maksudnya bahwa pendapatan yang diterima aparatur nagari hanya mencukupi kebutuhan pokok, sebab jika pendapatan kurang mencukupi membuat pemikiran aparatur nagari tidak hanya memikirkan pekerjaan, tapi juga memikirkan bagaimana caranya bisa mendapat tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kemudian terkait dengan masa kerja, masa kerja yang lama tidak membuat kinerja menurun, tetapi membuat titik jenuh aparatur nagari dalam bekerja meningkat.

Sama halnya dengan yang disampaikan Sekretaris nagari Parambahan Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, ia mengatakan bahwa :

“pendapatan kalau untuk sehari-hari Alhamdulillah cukup. yo kalau seandainya terpenuhi dari hari ka hari, minggu ka minggu, minggu ka bulan berarti awak ndk mikian yang lain lai, dan dari segi awak bakarajo ndk ado kendala, jadi awak bakarajo semaksimal mungkin, tapi kalau

seandainya kurang berarti harus mencari tambahan, tapi dengan pendapatan segitu Alhamdulillah tercukupi”.

(pendapatan kalau untuk sehari-hari Alhamdulillah cukup, ya kalau seandainya terpenuhi untuk hari ke hari, minggu ke minggu, minggu ke bulan berarti kita tidak memikirkan yang lainnya, dari segi kita bekerja tidak ada kendala, jadi kita bekerja semaksimal mungkin, tapi seandainya kurang berarti harus mencari tambahan, tapi dengan pendapatan segitu Alhamdulillah tercukupi.)

Maksudnya bahwa (jika pendapatan cukup tidak ada hal lain yang perlu difikirkan, sehingga mereka fokus bekerja, jika pendapatan dirasa masih kurang aparatur nagari perlu memikirkan sumber pendapatan lain.

Ia juga menjelaskan masih perlunya peningkatan pendapatan, karena yang nama nya kebutuhan banyak yang tak diduga, dari pada yang diduga, kalau untuk bulanan, sudah jelas. Kalau biaya tak terduga tidak bisa kita prediksi. Sehingga kalau dibilang semangat, semangat. Cuman dalam beberapa tahun tidak ada kenaikan gaji membuat kinerja kami sedikit menurun.)

Dari masalah yang dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa pendapatan sangat berpengaruh terhadap kinerja. Gaji akan berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai, ini disebabkan karena uang diperkirakan masih merupakan motivator yang kuat bagi pegawai, maka setiap instansi perlu memperhatikan mengenai gaji dan tunjangan kesejahteraan yang banyak diharapkan dari pada pegawai.

Selain itu masa kerja berpengaruh terhadap kinerja seorang pegawai. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap produktifitas pegawai adalah lama nya masa kerja, usia yang masih dalam masa produktif biasanya mempunyai tingkat produktifitas lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor pendapatan dan masa kerja yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar dengan judul **“Pengaruh Pendapatan dan Masa Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar.**

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan ketidaksesuaian antara pendapatan dan beban kerja aparatur nagari di Kabupaten Tanah Datar.
2. Adanya permasalahan ketidaksesuaian antara masa kerja aparatur nagari di Kabupaten Tanah Datar.
3. Kurangnya pendapatan membuat aparatur nagari tidak hanya memikirkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur nagari.
4. Meningkatnya titik jenuh aparatur nagari karena masa kerja yang sudah lama membuat kinerja nya berkurang.
5. Menurunnya kinerja aparatur nagari disebabkan tidak adanya kenaikan gaji aparatur dalam beberapa tahun.

C. Batasan Masalah

Mengingat ada beberapa masalah yang dikemukakan penulis pada latar belakang, oleh sebab itu penulis mencoba membatasi lingkup penelitian, dimana batasan

masalah yang diteliti ialah pengaruh pendapatan dan masa kerja terhadap kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya, yaitu “Apakah Terdapat Pengaruh Pendapatan dan Masa Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar?”. Secara lebih rinci rumusan masalah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah terdapat pengaruh masa kerja terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Masa kerja terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan nagari di kabupaten Tanah datar

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang terkait dengan Administrasi Publik tentang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Keuangan Publik.

2. Secara praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi wali nagari, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan Pendapatan dan Masa Kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan nagari.
- b. Bagi aparaturnagari, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan nagari.
- c. Bagi peneliti, secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana administrasi publik pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.